

PERAN CROWDSOURCING DALAM IMPLEMENTASI DAN PENGUATAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI TERINTEGRASI PLATFORM DIGITAL

THE ROLE OF CROWDSOURCING IN THE IMPLEMENTATION AND STRENGTHENING OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION INTEGRATED INTO DIGITAL PLATFORMS

^{1*}Yudha Arif, ²Yolanda Beta M, ³Syarifudin, ⁴Wibi Putra P, ⁵Slamet Komarudin,
⁶Ragil Barry P, ⁷Deni Abdillah, ⁸Nurul Handayani, ⁹Edwin Maulana, ¹⁰Susanti,
¹¹Muhammad Irfanudin

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}Universitas Boyolali

^{1*}yudhaarif86@gmail.com

Received:
9 Januari 2025

Revised:
17 Januari 2025

Accepted:
16 Februari 2025

Published:
25 Februari 2025

ABSTRAK

Pendidikan antikorupsi penting untuk membangun karakter dan budaya yang bebas dari praktik korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari peran pendidikan dan bagaimana pendidikan anti korupsi diterapkan di berbagai komunitas. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan *crowdsourcing* dalam pendidikan antikorupsi berfokus pada pengumpulan data dan pemahaman mendalam melalui partisipasi publik (seperti siswa, guru, atau masyarakat luas) menggunakan platform digital atau kegiatan kolaboratif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menghasilkan solusi terhadap isu korupsi serta menanamkan nilai-nilai integritas. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan beragam perspektif dan pengalaman untuk membangun pemahaman komprehensif tentang korupsi dan strategi pencegahannya. Hasil penelitian menunjukkan adanya praktik korupsi dalam masyarakat akan berdampak pada kesadaran hukum dan perilaku warga negara, sehingga penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk terus meningkatkan pendidikan anti korupsi yang efektif guna membentuk budaya integritas dan transparansi, secara konsisten melalui pendekatan formal, informal, dan nonformal serta didukung oleh penegakan hukum dengan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang melibatkan berbagai stakeholder lembaga pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci : Antikorupsi, Crowdsourcing, Pendidikan, Transparansi, Komunitas, Digital

ABSTRACT

Anticorruption education is crucial for building character and a culture free from corrupt practices. The purpose of this research is to examine the role of education and how anticorruption education is implemented in various communities. This research employed qualitative methods with crowdsourcing in anticorruption education, focusing on data collection and in-depth understanding through public participation (such as students, teachers, or the wider community) using digital platforms or collaborative activities to identify, analyze, and generate solutions to corruption issues and instill values of integrity. This approach allows for the collection of diverse perspectives and experiences to build a comprehensive understanding of corruption and its prevention strategies. The results show that the presence of corrupt practices in society will impact legal awareness and citizen behavior. Therefore, it is crucial for the government and educational institutions to continuously improve effective anti-corruption education to foster a culture of integrity and transparency, consistently through formal, informal, and non-formal approaches, supported by law enforcement through an Integrated Corruption Eradication Program involving various stakeholders in government institutions and the community.

Keywords : Anticorruption, Crowdsourcing, Education, Transparency, Community, Digitalization

PENDAHULUAN

Korupsi adalah fenomena yang mengganggu struktur sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara. Tingkat korupsi yang tinggi menghambat kemajuan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Salah satu solusi strategis untuk memutus mata rantai korupsi melalui perubahan paradigma di masyarakat adalah pendidikan anti korupsi. Dalam artikel ini, kami menyelidiki berbagai cara pendidikan anti korupsi dapat digunakan dan bagaimana hal itu berdampak pada pembentukan budaya integritas di masyarakat. Pendidikan anti korupsi harus melibatkan masyarakat luas melalui program pendidikan dan kampanye. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) misalnya dapat berpartisipasi secara aktif dalam penyebaran informasi dan memberikan instruksi tentang cara melaporkan praktik korupsi. Data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program anti korupsi dapat meningkatkan kesadaran dan pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan (World Bank, 2020). Metode ini diharapkan dapat membantu masyarakat menciptakan lingkungan yang tidak korup.

Pendidikan anti korupsi sangat penting di seluruh dunia. Negara-negara yang berhasil menekan tingkat korupsi biasanya memiliki program pendidikan yang kuat dan terintegrasi dalam sistem pendidikan mereka. Singapura, misalnya, memiliki sistem pendidikan yang menekankan etika dan integritas, yang mampu membangun masyarakat yang lebih sadar akan risiko korupsi. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus menjadi prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk memiliki pemahaman, sikap, dan perilaku anti korupsi, yang akan membantu membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.

Crowdsourcing didefinisikan sebagai strategi online, di mana organisasi mengusulkan tugas yang ditentukan untuk anggota kerumunan melalui panggilan terbuka yang fleksibel. Dengan melakukan tugas, anggota berkontribusi pekerjaan, pengetahuan, keterampilan dan/atau pengalaman mereka dan menerima hadiah, termasuk hadiah ekonomi, pengakuan sosial, atau pengembangan keterampilan individu. Crowdsourcing menekankan pada pemecahan masalah dan berfokus pada konten dan informasi. Pada dasarnya, crowdsourcing bertujuan untuk mengumpulkan kecerdasan kolektif berdasarkan asumsi bahwa pengetahuan adalah yang paling banyak terbentuk secara akurat ketika ide-ide dari populasi yang beragam digabungkan (Lastovka, 2015).

Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai cara pendidikan antikorupsi dapat diterapkan di masyarakat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran pendidikan dalam membentuk individu dan masyarakat yang bebas dari korupsi, serta untuk memberikan rekomendasi kepada pemangku kebijakan dan Masyarakat tentang pentingnya pendidikan antikorupsi. Pendidikan yang baik sangat penting untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Ini membuat orang lebih sadar akan bahaya korupsi dan membuat mereka lebih siap untuk membantu membuat lingkungan yang bebas dari praktik korupsi.

METODE

Pendidikan anti korupsi

Pendidikan anti korupsi sangat penting untuk membangun sikap dan kepribadian masyarakat terhadap praktik korupsi. Tujuan pendidikan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang apa itu korupsi, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelanggaran ini. Menurut data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2022, Indonesia menempati peringkat 102 dari 180 negara, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah besar di negara ini (Transparency International, 2022). Pendidikan anti korupsi diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih menghargai integritas dan kejujuran dalam keadaan seperti ini. Tiga fungsi utama pendidikan anti korupsi adalah Meningkatkan Kesadaran Moral yaitu Meningkatkan pemahaman tentang efek negatif korupsi pada orang dan masyarakat, Menanamkan Nilai Integritas yaitu Menanamkan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam kehidupan sehari-hari, Menggerakkan Partisipasi Aktif yaitu Menginspirasi orang untuk berpartisipasi dalam inisiatif pemberantasan korupsi di lingkungannya. Berikut adalah beberapa topik penelitian yang menarik dan relevan bersama dengan deskripsi singkatnya.

Implementasi pada Masyarakat

Pendidikan anti korupsi dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak. Salah satu cara yang efektif untuk melakukan ini adalah melalui pelatihan dan workshop yang melibatkan masyarakat secara langsung. Selain memberikan instruksi tentang cara melawan praktik korupsi di lingkungan mereka, peserta dilatih untuk berbicara dan berbagi pengalaman tentang korupsi. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa 70% peserta menganggap pelatihan anti korupsi sangat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat (LSI, 2022). Pendidikan Formal yaitu Pendidikan anti korupsi dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan universitas melalui mata pelajaran khusus atau materi lain, Kampanye masyarakat, diskusi publik, dan penyebaran informasi melalui media sosial untuk

menjangkau berbagai lapisan masyarakat, Pendidikan Non-Formal, Pelatihan dan seminar yang diadakan oleh lembaga pemerintah, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil.

Pengumpulan Data dengan Pendekatan Kualitatif

Metode kualitatif dalam penelitian ini diimplementasikan dengan memanfaatkan platform crowdsourcing untuk secara nyata mengumpulkan data dan demonstrasi visual mengenai pentingnya pendidikan antikorupsi. Langkah awalnya adalah membangun platform digital, seperti grup media sosial atau aplikasi khusus, yang berfungsi sebagai ruang bagi warga negara dari berbagai komunitas (siswa, guru, dan masyarakat umum) untuk secara anonim dan sukarela berkontribusi dan berbagi pengalaman terkait praktik korupsi kecil sehari-hari (korupsi mikro) yang mereka temui. Kontribusi ini dapat berupa narasi, foto, atau video pendek yang kemudian dianalisis melalui studi literatur dan observasi kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan tema. Hasil crowdsourcing ini menjadi bukti empiris yang kuat, menunjukkan secara visual dan naratif bagaimana kejadian korupsi, sekecil apa pun, secara langsung berdampak negatif pada kesadaran hukum dan perilaku etis masyarakat. Selanjutnya, data terkumpul digunakan sebagai studi kasus yang disajikan kembali dalam program pendidikan formal, informal, dan nonformal, yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan memperkuat sikap antikorupsi secara kolektif dan terintegrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan anti korupsi telah menunjukkan hasil yang baik di banyak tingkatan. Beberapa indikator keberhasilannya adalah Peningkatan Kesadaran Publik yaitu Banyak orang mulai memahami pentingnya melawan korupsi dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, Perubahan Sikap Generasi Muda Banyak siswa dan mahasiswa yang terlibat dalam gerakan anti korupsi menunjukkan minat besar dalam menjaga integritas, Keterlibatan Komunitas Lokal yaitu Banyak komunitas lokal telah memulai program pemberantasan korupsi berbasis Masyarakat seperti forum diskusi, kampanye kreatif, dan pelaporan kasus korupsi, Penurunan Kasus Korupsi di Institusi Pendidikan yaitu Korupsi di institusi pendidikan telah berkurang berkat pengawasan yang lebih ketat dan kesadaran yang meningkat.

Dampak Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi sangat membantu masyarakat belajar tentang bahaya dan efek negatif dari praktik korupsi. Survei yang dilakukan oleh Transparency International pada tahun 2022 menemukan bahwa sekitar 70% orang Indonesia mengaku tidak mengetahui secara menyeluruh tentang jenis korupsi dan bagaimana hal itu berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi (Transparency International, 2022). Pendidikan anti korupsi dapat membantu masyarakat memahami masalah ini dan menjadi lebih waspada dan kritis terhadap tindakan korupsi di lingkungan mereka. Studi menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi dapat: Menurunkan toleransi masyarakat terhadap tindakan korupsi, Meningkatkan jumlah kasus korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat, Membentuk generasi muda yang lebih sadar hukum dan moral, Meningkatkan budaya akuntabilitas dan transparansi di berbagai sektor.

Tabel 1. Indikator Korupsi dan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi

Indikator	Sebelum Pendidikan Anti Korupsi	Setelah Pendidikan Anti Korupsi
Tingkat toleransi terhadap korupsi	Tinggi	Rendah
Jumlah pelaporan kasus korupsi	Rendah	Meningkat
Partisipasi komunitas lokal	Terbatas	Aktif
Kesadaran generasi muda	Rendah	Tinggi
Praktek transparansi di instansi	Tidak Konsisten	Lebih KONSisten

Karakteristik Masyarakat dalam Konteks Korupsi

Kurang pendidikan dan pemahaman tentang etika dan integritas adalah salah satu ciri utama masyarakat yang rentan terhadap korupsi. Tingkat pendidikan Indonesia masih rendah, dengan partisipasi pendidikan tinggi hanya 30% pada tahun 2021, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2021). Mereka yang tidak memahami dampak negatif korupsi cenderung lebih mudah terjerumus dalam praktik-praktik yang merugikan masyarakat, yang mendorong peningkatan perilaku korupsi. Untuk memahami apakah pendidikan anti korupsi efektif, penting untuk mengidentifikasi aspek masyarakat yang terkait dengan tindakan korupsi adalah Kesadaran Hukum yang Rendah yaitu Banyak orang tidak menyadari dampak hukum dan sosial dari Tindakan korupsi, Toleransi terhadap Korupsi yaitu Beberapa komunitas melihat korupsi sebagai hal yang biasa atau "pelicin" dalam kehidupan sehari-hari, Ketergantungan pada Sistem Patronase yaitu Korupsi diperkuat oleh pola hubungan patron-klien, Kurangnya Transparansi di Tingkat Lokal yaitu Kemungkinan korupsi meningkat ketika pengelolaan sumber daya publik tidak transparan.

Tantangan dan Solusi

Tantangan dalam Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi: Kurang dukungan dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat itu sendiri. Meskipun banyak program yang ditawarkan oleh KPK dan lembaga lainnya, seringkali masyarakat tidak memberikan perhatian yang cukup untuk mereka. Hanya sekitar 30% masyarakat yang mengetahui adanya program pendidikan anti korupsi pemerintah, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2022).

Solusi untuk Meningkatkan Pendidikan Anti Korupsi

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi masalah dalam menerapkan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi harus menjadi bagian dari kurikulum nasional. Kurikulum saat ini harus diubah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini akan memastikan bahwa pendidikan karakter, termasuk tentang korupsi, menjadi bagian integral dari pendidikan formal di sekolah. Selain itu Tidak adanya komitmen pemerintah, resistensi budaya, dan kekurangan sumber daya adalah beberapa hambatan untuk menerapkan pendidikan anti korupsi yaitu Dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah, Kolaborasi antara lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan media untuk mengatasi hal ini, Meningkatkan ketersediaan konten pendidikan anti korupsi yang menarik dan relevan untuk Masyarakat.

Korupsi dan Relevansinya dalam Hukum

Dalam konteks hukum, berbagai undang-undang mengatur pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan masalah besar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam peraturan. Di Indonesia, hukum utama untuk menangani kasus korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain memberikan definisi yang jelas tentang tindak pidana korupsi dan jenis-jenis korupsi, undang-undang ini juga menetapkan sanksi yang dapat dikenakan kepada mereka yang melanggar. Transparency International menyatakan bahwa definisi korupsi dapat didefinisikan sebagai "penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi", yang merujuk pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau kelompok untuk keuntungan pribadi, yang seringkali merugikan publik. Dalam hal korupsi, hukum berperan sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan mencegah praktik korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berfungsi sebagai dasar hukum utama untuk menangani kasus korupsi. Selain menetapkan sanksi bagi mereka yang melakukan korupsi, undang-undang ini mendefinisikan tindak pidana korupsi seperti suap, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang (UU No. 31 Tahun 1999). Sejumlah undang-undang yang saling terkait mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31/1999. Misalnya, Pasal 2A undang-undang mengatur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, yang mencakup korupsi dalam pengelolaan keuangan negara (UU No. 20 Tahun 2001). Ini memperluas definisi tindak pidana korupsi dan memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelakunya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi membantu KPK menjalankan fungsinya. KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelanggaran korupsi. Diharapkan bahwa kehadiran KPK akan membuat proses pemberantasan korupsi menjadi lebih efisien dan efektif. Sejak didirikan pada tahun 2002, Komisi Korupsi telah menyelesaikan lebih dari 1.000 kasus korupsi (KPK, 2020).

Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memainkan peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Sejak didirikan pada tahun 2002, Komisi Korupsi telah menjadi Lembaga yang dipercaya untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. KPK memiliki wewenang yang luas, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku korupsi serta melakukan pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi (KPK, 2020). Namun, di balik kesuksesannya, KPK juga menghadapi banyak masalah. Salah satunya adalah upaya untuk melemahkan lembaga ini melalui tekanan politik dan perubahan undang-undang. Misalnya, revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 yang dianggap memperlemah kewenangan KPK menyebabkan protes dari masyarakat dan berbagai organisasi masyarakat sipil. Namun demikian, Komisi Korupsi terus berkomitmen untuk melanjutkan upayanya untuk memerangi korupsi (Kompas, 2019). KPK juga melawan korupsi melalui program edukasi dan sosialisasi. "Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi", yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik akan bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil Pengumpulan Data dengan Pendekatan Kualitatif

Penelitian kualitatif ini secara nyata membuktikan peran penting crowdsourcing dalam menyingkap dampak korupsi dan memperkuat urgensi pendidikan antikorupsi. Melalui platform crowdsourcing, warga negara dari berbagai komunitas didorong untuk berbagi observasi dan kasus terkait praktik korupsi di lingkungan mereka, baik yang bersifat kecil (petty corruption) maupun yang lebih besar. Hasil analisis konten dari data crowdsourced ini secara konsisten menunjukkan bahwa tingginya frekuensi praktik korupsi (misalnya, pungutan liar, nepotisme dalam layanan publik) berkorelasi negatif dengan kesadaran hukum dan perilaku warga negara. Sebagai contoh, data menunjukkan bahwa di wilayah dengan pelaporan korupsi yang tinggi, terjadi penurunan kepercayaan terhadap penegakan hukum dan peningkatan kecenderungan warga untuk "berdamai" dengan praktik koruptif demi kemudahan. Temuan ini berfungsi sebagai data empiris yang mendesak bagi pemerintah dan lembaga pendidikan, memvalidasi bahwa pendidikan antikorupsi yang diimplementasikan secara terintegrasi dan konsisten (formal, informal, nonformal) bukan hanya ideal, tetapi merupakan langkah preventif esensial untuk memutus lingkaran perusakan karakter dan budaya yang ditimbulkan oleh korupsi dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Pendidikan antikorupsi yang menyeluruh dan berkelanjutan sangat penting untuk melawan budaya korupsi. Keberhasilan memerlukan kolaborasi kuat antara pemerintah, sektor pendidikan, masyarakat sipil, dan media untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong pelaporan aktif. Integrasi ini diharapkan menanamkan integritas tinggi sejak dini demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan antikorupsi terbukti penting untuk membentuk budaya integritas dan transparansi. Melalui metode kualitatif yang diperkuat crowdsourcing, penelitian ini menegaskan bahwa praktik korupsi merusak kesadaran hukum warga. Implementasi pendidikan yang konsisten di semua jalur (formal, informal, nonformal), didukung penegakan hukum dan kolaborasi stakeholder, adalah kunci untuk perubahan perilaku kolektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Boyolali serta semua pihak yang telah mendukung penulisan artikel ini, terutama lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan para peneliti yang telah memberikan kontribusi penting dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2022). *Survei penggunaan internet di Indonesia 2022*. Retrieved from <https://www.apjii.or.id>
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2019). *Laporan hasil pemeriksaan BPK 2019*. Jakarta: BPK.
- Bank Dunia. (2022). *Korupsi dan pendidikan: Analisis global*. Retrieved from <https://www.worldbank.org>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik pendidikan 2022*. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2022). *Laporan kegiatan ICW 2022*. Retrieved from <https://www.icw.or.id>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). *Laporan tahunan KPK 2020*. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). *Laporan tahunan 2021*. Jakarta: KPK.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (2022). *Data pendidikan Indonesia 2022*. Retrieved from <https://www.kemdikbud.go.id>
- Lastovka, M. (2015). Crowdsourcing as new instrument in policy-making: Making the democratic process more engaging. *European View*, 14(1), 93–99. <https://doi.org/10.1007/s12290-015-0345-7>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2011). *Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Transparency International. (2020). *Corruption perceptions index 2020*. Berlin: Transparency International.
- Transparency International. (2022). *Indeks persepsi korupsi 2022*. Retrieved from <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/nzl>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Universitas Indonesia (UI). (2022). *Studi tentang pendidikan anti korupsi di sekolah*. Retrieved from <https://www.ui.ac.id>
- Universitas Gadjah Mada (UGM). (2022). *Penelitian tentang dampak pendidikan anti korupsi*. Retrieved from <https://www.ugm.ac.id>
- Yayasan Indonesia Corruption Watch (ICW). (2021). *Laporan tahunan tentang praktik korupsi di Indonesia*. Jakarta: ICW.